

Tantangan dan Dampak Stroke di Indonesia

Menurut hasil riset Riskesdas 2018, prevalensi stroke di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

JAKARTA(IM)-Stroke kondisi medis serius ketika aliran darah ke bagian otak terganggu, menjadi perhatian utama dalam ranah kesehatan di Indonesia. Menurut hasil riset Riskesdas 2018, prevalensi stroke di Indonesia telah meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Dari 7 kasus per 1.000 penduduk pada 2013, angka tersebut melonjak tajam menjadi 10,9 kasus per 1.000 penduduk pada 2018. Tren ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi masyarakat

dalam menghadapi masalah kesehatan ini.

“Dampak stroke terhadap kesehatan masyarakat tidak dapat dipandang enteng. Selain menjadi penyebab utama disabilitas, stroke juga memengaruhi ekonomi keluarga dan sistem kesehatan secara keseluruhan. Biaya perawatan jangka panjang, termasuk terapi dan rehabilitasi, dapat memberikan beban finansial yang berat bagi keluarga yang terkena dampaknya,” ujar Tomoaki Watanabe, Direktur Omron Healthcare Indonesia.

Disabilitas yang diakibatkan oleh stroke, seperti kelum-

puhan, kesulitan berbicara, dan masalah ingatan, juga mengganggu kualitas hidup pasien dan memerlukan perawatan yang intensif, baik dari segi medis maupun nonmedis.

“Untuk mengatasi tantangan ini, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang faktor risiko dan gejala stroke menjadi krusial. Upaya pencegahan, seperti mengadopsi gaya hidup sehat dan mengontrol faktor risiko seperti tekanan darah tinggi dan diabetes, dapat membantu mengurangi risiko terkena stroke. Selain itu, pendidikan tentang tanda-tanda awal stroke dan pentingnya reaksi cepat dalam mencari pertolongan medis juga penting untuk mengurangi dampak yang ditimbulkan,” tambahnya.

Dalam menghadapi meningkatnya prevalensi stroke di Indonesia, Omron Healthcare Indonesia turut berkon-

tribusi dengan menyediakan solusi kesehatan yang inovatif.

Salah satu inisiatif terbaru ialah mengintegrasikan kalkulator risiko stroke (stroke risk calculator/SRC) dari Auckland University of Technology (AUT) ke dalam aplikasi dan situs web Omron. SRC dirancang untuk mengevaluasi risiko stroke seseorang dalam lima atau 10 tahun ke depan dengan faktor risiko berbagai faktor seperti usia, jenis kelamin, tekanan darah, kadar kolesterol, riwayat kesehatan, dan faktor gaya hidup. Tujuannya memfasilitasi intervensi dini dan memotivasi perubahan gaya hidup untuk meningkatkan manajemen kesehatan.

SRC bisa digunakan oleh mereka yang berusia 20 hingga lebih dari 90 tahun an ingin mengetahui risiko stroke. Dengan menjawab 21 pertanyaan yang telah teruji secara ilmiah,

seorang dapat memperkirakan dan memahami risiko stroke mereka dalam waktu 5 menit.

“Kami berkomitmen mendukung upaya pencegahan dan pengelolaan stroke di Indonesia. Melalui teknologi canggih dan solusi perawatan kesehatan yang mudah diakses, kami berharap dapat membantu masyarakat Indonesia untuk mengurangi risiko terkena stroke dan meningkatkan kualitas hidup mereka,” tambah Watanabe.

Selain itu, kerja sama antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan sektor swasta, termasuk perusahaan, menjadi kunci dalam mengatasi tantangan kesehatan masyarakat yang kompleks ini. Dengan upaya bersama, diharapkan bahwa Indonesia dapat mengurangi beban stroke dan meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. ● tom

SAMBUNGAN

DARI HAL 1

Mei, Inflasi Indonesia 2,84 Persen....

lalu inflasi berapa, pertumbuhan ekonomi berapa,” ujarnya.

“Selalu saya tanyakan itu supaya kita semua peduli terhadap hal yang sangat penting karena begitu inflasi naik misal 9,6% pertumbuhan ekonomi kita di angka 5 yang dirasakan adalah rakyat,” lanjut Jokowi.

Jokowi mengaku senang inflasi saat ini berada di angka 2,84%, dan pertumbuhan ekonomi berada di angka 5,11%. Jokowi mengatakan ini

adalah kabar yang menyegarkan.

“Sekarang inflasi 2,84 terus pertumbuhan ekonominya 5,11% nah ini segar, segar kalau seperti ini. Tapi kita harus tetap waspada, hati hati tidak boleh lengah, tantangan ke depan tidak mudah,” ujarnya.

Gelontorkan Rp39 Triliun Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perencanaan Airlangga Hartarto mengungkapkan, hingga 31 Mei 2024, pemerintah pusat

sudah menggelontorkan Rp 39 triliun untuk pengendalian inflasi. Realisasi itu setara dengan 29 persen dari pagu Rp 124,16 triliun.

“Dari sisi fiskal pusat, anggaran Kementerian/Lembaga terus didorong realisasi sampai 31 Mei anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp 39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp 124,16 triliun,” kata Airlangga dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID)

Award di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (14/6).

Sementara itu, ia menyebutkan, pmda sudah merealisasikan Rp 13,56 triliun dari pagu Rp 92,87 triliun. Di sisi lain, pemerintah sudah melakukan berbagai cara untuk mendorong stabilitas harga. Dalam jangka pendek, cara yang dilakukan adalah penyaluran SPHP, bantuan pangan, dan gerakan pangan murah.

“Ini telah berhasil menekan kenaikan harga terhadap harga pangan lebih

tinggi,” ujar Airlangga.

Kemudian, peningkatan produksi pertanian dengan penambahan alokasi pupuk subsidi maupun akses pembiayaan untuk sektor pertanian. Lalu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk sektor pertanian sebesar 30 persen.

“Memastikan kelancaran distribusi terutama untuk 10 komoditas pangan strategis oleh Bapanas dan optimalisasi tol laut untuk daerah 3T,” jelas Airlangga. ● mar

KPK Sita Aset dan Uang Lebih Rp11 Miliar...

dari pengendalian proses lelang proyek perbaikan atau pembangunan jalur kereta.

“Fee yang diterima tersebut sebagian telah berhasil disita oleh KPK, antara lain 7 deposito senilai Rp 10 miliar, satu kartu ATM, dan uang tunai senilai Rp 1.080.000.000 dari pengembalian uang tersangka YO terkait penerimaan logam mulia,” ujar Asep dalam keterangannya, Jumat (14/6).

Selain itu, lanjut Asep, KPK juga menyita delapan tabungan reksa dana senilai Rp 6 miliar atas nama tersangka Dion Renato Sugiarto, pemilik perusahaan yang dibantu dan dimenangkan oleh Yofi, dalam proses lelang proyek Balai Teknik Perkeraan (BTP) Kelas I Bagian Jawa Tengah di bawah DKJA Kemenhub.

“Kemudian juga disita 8 bidang tanah dan sertifikatnya di Jakarta, Semarang dan Purwokerto senilai kurang lebih Rp 8 miliar,” kata Asep.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan pejabat pembuat komitmen (PPK) BTP Kelas I Bagian Jawa Tengah, Yofi Oktarisza sebagai tersangka dugaan suap.

Asep mengatakan, perkara Yofi merupakan pengembangan dari kasus suap pemilik PT Istana Putra Agung, Dion Renato Sugiarto ke PPK di BTP Semarang, Bernard Hasibuan, dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

“Setelah menemukan kecukupan alat bukti, penyidik menetapkan YO (Yofi Oktarisza) selaku Pejabat Pembuat Komitmen pada BTP

Kelas 1 Jawa Bagian Tengah yang menjadi BPT Semarang Tahun 2017 sampai dengan 2021 sebagai tersangka,” kata Asep dalam konferensi pers di KPK, Jakarta, Kamis (13/6) kemarin.

Asep mengatakan, Yofi merupakan PPK sejumlah proyek di lingkungan BTP Jawa Bagian Tengah, di antaranya adalah peningkatan jalur kereta api Purwokerto-Kroya tahun 2017. Kemudian, jalur kereta api Lintas Banjar-Kroya tahun 2018 dan jalur kereta api Lintas Banjar-Kroya tahun 2020.

Kemudian, kegiatan pembangunan jalur ganda Cirebon-Kroya tahun 2019 hingga PPK Area II lingkup pekerjaan pembangunan atau peningkatan atau perawatan atau rehabilitasi konstruksi

dan fasilitas operasi kereta. Cakupannya meliputi jalur kereta api Cirebon-Kroya, Banjar-Kroya-Yogyakarta, Tegal-Prupuk, Purwokerto-Wonosobo, hingga Maos-Cilacap.

Dalam melaksanakan proyek itu, Yofi diduga mencurangi proses lelang dengan memenangkan perusahaan-perusahaan yang dimiliki Dion.

Selain sebagai pemilik PT Istana Putra Agung, Dion juga pemilik PT Prawiramas Puriprima dan PT Rineng Ria Raya. Perusahaan itu digunakan Dion untuk mengikuti lelang di DJKA, termasuk tempat Yofi bertugas.

Sementara itu, Yofi menjadi PPK 19 pekerjaan barang dan jasa dari PPK sebelumnya dan 14 paket pengadaan

barang dan jasa baru di BTP Jawa Bagian Tengah.

“Saudara Dion Renato Sugiarto mendapatkan bantuan dari PPK termasuk Yofi untuk bisa mendapatkan paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa,” tutur Asep.

Beberapa paket pekerjaan yang dimenangkan Dion di antara senilai Rp 128,5 miliar, Rp 12,4 miliar, Rp 49,9 miliar, dan Rp 37,1 miliar. Yofi disebut menerima fee dari para rekanan pelaksana proyek di lingkungan DJKA itu senilai 10 sampai 20 persen dari paket pekerjaan yang mereka menangkan. Karena perbuatannya, Yofi disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b dan/atau Pasal 11 dan Pasal 12B Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. ● mar

Antisipasi Kekeringan, 20.000 Pompa Air...

Jumat (14/6).

“Dalam tiga bulan ini Kementan, Kementerian PU sudah saya perintahkan kerja sama dengan TNI, Panglima TNI dan kodam-kodam untuk secepatnya memasang, membangun pompa-pompa, mungkin 20.000-an pompa akan kita pasang di daerah-daerah yang memiliki produksi utamanya beras,” kata Jokowi, Jumat (14/6).

Kepala Negara menuturkan, pompa-pompa itu akan berfungsi untuk mengaliri air ke persawahan saat ancaman iklim dan suhu panas semakin mendekat.

Presiden Jokowi mengatakan, jika tidak diantisipasi, gagal panen berpotensi terjadi karena kekeringan.

“Ini urusan kehidupan manusia. Urusan air enggak kita urus, produksi turun, stok menipis, otomatis harga pasti naik,

otomatis juga inflasi pasti akan naik lagi. Rentetan ini yang harus diantisipasi, direncanakan, dan korban-nya sekali lagi, rakyat,” tuturnya.

Hingga saat ini sudah 1.600 pompa dikirim ke Komando Daerah Militer (Kodam) di berbagai wilayah, utamanya di daerah produksi komoditas utama. Jokowi bakal mengecek secara berkala ke lapangan agar

proses pemasangan tepat waktu sehingga panen beras tetap banyak meski El Nino.

“Entar saya cek di lapangan sehingga betul-betul saat kering karena El Nino, bulan Juli sudah mulai, masuk Agustus, September, kita siap sehingga produksi tidak turun. Itu goalnya,” jelas Jokowi.

Di sisi lain, pemerintah menargetkan membangun

61 waduk dan bendungan untuk mengantisipasi masalah serupa. Sejauh ini, sudah 43 dari target tersebut yang direalisasikan.

“Tapi air ini juga harus diteruskan sampai ke sawah. Harus ada saluran primernya, harus ada irigasi sekunder, tersier, sampai betul-betul ke sawah sehingga meningkatkan produksi. Ini nanti akan menjaga inflasi kita tidak naik,” sebut Jokowi. ● mar

Lebih dari 25 Persen Warga Indonesia Belum Punya Jaminan Kesehatan

JAKARTA(IM)-Kementerian Kesehatan melaporkan 25 persen masyarakat Indonesia belum memiliki jaminan kesehatan aktif. Didominasi masyarakat yang berdomisili di daerah.

Mengacu pada hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, dari total tersebut, 34 persen di antaranya adalah masyarakat pedesaan. Sementara 23 persen berada di daerah perkotaan.

Kepala Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Syarifah Liza Munira merinci lebih lanjut, kebanyakan yang tidak memiliki asuransi adalah di kelompok usia anak.

“Ada 40 persen balita yang tidak terlindungi,” sebut dia dalam Diseminasi Hasil Survei Kesehatan Indonesia 2023, Rabu (12/6).

Bila dirinci lebih lanjut, sekitar 47,3 persen bayi berusia 1 tahun tidak memiliki jaminan kesehatan dan usia 1-4 tahun seban-

yak 40 persen di antaranya tidak memiliki jaminan kesehatan.

Populasi usia terbanyak yang memiliki jaminan kesehatan berada di rentang 15 hingga 24 tahun, serta usia lansia 75 tahun ke atas.

Menurut SKI, jarang sekali masyarakat Indonesia memiliki lebih dari satu jaminan kesehatan. Dari total populasi yang dianalisis, hanya 1,1 persen pada masyarakat perkotaan, dan 0,1 persen di masyarakat pedesaan.

Rupanya hal ini sejalan dengan laporan fasilitas kesehatan terbanyak yang diakses warga Indonesia.

Nyaris 40 persen masyarakat memilih pergi ke puskesmas ketimbang klinik atau praktik mandiri, serta rumah sakit. Alasannya berkaitan dengan biaya yang murah dan akses mudah dijangkau.

Kemudahan akses menjadi alasan utama untuk dijangkau dan biaya yang murah,” ucapnya.

Hanya 7 persen di antaranya yang menjalani perawatan ke rumah sakit. ● tom

Deteksi Dini Gangguan Tumbuh Kembang Anak di Puskesmas Perlu Ditingkatkan

JAKARTA(IM)-Deteksi dini diperlukan untuk mengetahui lebih awal penyimpangan pada tumbuh kembang anak. Hal itu merupakan rekomendasi dari studi yang dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Kementerian Kesehatan tentang evaluasi pelayanan Stimulasi, Deteksi dan Intervensi Dini Tumbuh Kembang (SDIDTK) di puskesmas pada Desember 2023 lalu. Hasil studi ini memberikan rekomendasi agar puskesmas dapat lebih memperkuat kapasitas layanan SDIDTK, baik dari sisi SDM, fasilitas, sistem rujukan, hingga pendanaan.

“Salah satu hasil rekomendasi studi ini adalah perlunya pelatihan bagi tenaga kesehatan pemberi layanan SDIDTK melalui blended learning, untuk meningkatkan pengetahuan dan kapasitas tenaga kesehatan agar memberikan pelayanan sesuai standar secara masif,” kata Peneliti Ahli Muda Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi BRIN Esti Nugraheny, Kamis (13/6).

Hal ini berangkat dari studi yang dilakukan di sembilan kabupaten/kota terpilih, mewakili regional barat, tengah, dan timur. Dengan masing-masing kabupaten/kota terpilih dua puskesmas. Sehingga, didapat sasaran responden untuk pengamatan dan wawancara sebanyak total 18 puskesmas. Selain itu juga dilakukan pengisian instrumen online dengan total responden 192 puskesmas penanggung jawab SDIDTK di wilayah kerja kabupaten/kota terpilih.

Studi ini menemukan bahwa 55,6 persen puskesmas memberikan pelay-

anan SDIDTK, 72,2 persen memberikan pelayanan di posyandu, dan 55,6 persen memberikan pelayanan di PAUD/TK/RA. Namun, kepatuhan petugas dalam penatalaksanaan SDIDTK pada anak usia 6 bulan baru mencapai 53,8 persen, anak usia 24 bulan 53,3 persen, dan anak usia 36 bulan 50,5 persen.

Sedangkan kebutuhan waktu dalam memberikan pelayanan SDIDTK berkisar antara 29 sampai 35 menit. “Yang perlu disoroti juga, 88,9 persen puskesmas telah memiliki jejaring rujukan SDIDTK, namun hanya 55,6 persen yang memiliki catatan atau register kasus rujukan,” ungkap Esti.

Terkait sarana dan prasarana layanan pendukung SDIDTK, sebut Esti, hanya 27,8 persen puskesmas yang memiliki SDIDTK kit lengkap, dan hanya 33,3 persen puskesmas memiliki funduskopi atau oftalmoskopi direk. “Selain peningkatan kapasitas kesehatan, perlunya penguatan sistem rujukan SDIDTK, termasuk rujuk balik dari Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP),” beber Esti.

Pemantauan laporan SDIDTK secara berjenjang baik laporan manual maupun digital juga dinilai perlu ditingkatkan. Selain itu, perlunya mengoptimalkan dukungan dana alokasi khusus (DAK) fisik dalam pemenuhan sarana prasarana dan ketersediaan ruang pelayanan SDIDTK, dan meningkatkan pemantauan pelayanan SDIDTK di puskesmas oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. “Kementerian Kesehatan juga perlu menyusun pedoman monitoring dan evaluasi SDIDTK secara berjenjang untuk penguatan layanan SDIDTK ini,” pungkasnya. ● tom

InternationalMedia

PEMIMPIN REDAKSI: Osmar Siahaan
PELAKSANA HARIAN: Lusi J, Bambang Suryo Sularso.
PENANGGUNG JAWAB: Prayan Purba.
KORDINATOR LIPUTAN/FOTO: Sukris Priatmo.
REDAKSI: Frans G, Vitus DP, Berman LR.
ARTISTIK: M Rifki, James Donald, Indra Saputra.
SIRKULASI-PROMOSI: Amir Mahmud, Nurbayin, Akhyar, Ferry S., Fatwa Yuda.
AGEN: SOLO (ABC), BELITUNG (Naskafa Tjen).
PANGKAL PINANG (Yuliani, John Tanzil), **BALIKPAPAN** dan **SAMARINDA** (Cv Gama Abadi, Alan/Tatang), **MAKASSAR** dan **MANADO** (Jefri/Meike, Jemmy), **TARAKAN KALTIM** (Ali), **BALI** (Swasti), **PEKANBARU** (Bob), **SURABAYA**, **MEDAN** dan **PONTIANAK**.
KEUANGAN/IKLAN: Citta.
BIRO BOGOR: Subagiyo (Kepala Biro), Jaidarman.
BIRO TANGERANG: Johan (Kepala Biro).
BIRO BEKASI: Madong Lubis (Kabiro),
BIRO SEMARANG: Tri Untoro.
BIRO BANDUNG: Lyster Marpaung.
BIRO BANTEN: Drs H Izul Juzuli (Kepala Biro), Stefano (Koordinator Berita Serang, Pandeglang dan Lebak).
BIRO LEBAK: Nofi Agustina (Kabiro).
BIRO JAMBI: Beni, Ratumas Sabar Riah, Rts Zuchriah.
HARGA ECERAN: Rp 2.500./eks (di luar kota Rp 3.000./eks), Harga Langganan Rp 50.000./Bulan.

Alamat Redaksi/Iklan : Gedung Guo Ji Ribao Lt 3
 Jalan Gunung Sahari XI No. 291 Jakarta Pusat 10720
 Tel : 021-6265566
 Twitter: InternationalMedia @redaksi_IM

Hamis Sebut Tak Ada yang Tahu Berapa...

kan penuh pasukan Israel dari Gaza.

Berbicara kepada CNN, Hamdan mengaku tidak tahu berapa banyak sandera yang masih hidup.

“Saya tidak tahu apa apa tentang itu. Tidak ada yang tahu mengenai hal ini,” katanya.

Dia menuduh tanpa memberikan bukti apa pun, bahwa operasi Israel untuk membebaskan empat

sandera pada Sabtu (8/6) mengakibatkan kematian tiga orang lainnya, termasuk seorang warga negara Amerika.

Ada kekhawatiran bahwa lebih banyak sandera yang tewas daripada yang diketahui publik. Pada bulan April, Hamas mengatakan kepada mediator internasional bahwa mereka tidak dapat memenuhi permintaan

Israel untuk membebaskan 40 sandera yang tersisa pada tahap pertama perjanjian, termasuk semua perempuan serta laki-laki yang sakit dan lanjut usia, karena mereka tidak menahani 40 orang yang masih hidup, yang memenuhi kriteria pembebasan tersebut.

Ditanya tentang kesaksian seorang dokter yang merawat para sandera

yang dibebaskan dan mengatakan mereka menderita penganiayaan mental dan fisik serta dipukuli setiap jam, Hamdan kembali menyalahkan Israel atas penderitaan mereka.

“Saya yakin kalau mereka punya masalah mental, itu karena perbuatan Israel di Gaza. Karena (tidak ada yang bisa) menangani apa yang dilakukan Israel, melakukan pengeboman

setiap hari, membunuh warga sipil, membunuh perempuan dan anak-anak, meereka melihatnya (dengan) mata kepala mereka sendiri,” katanya.

Dia menambahkan bahwa ia membandingkan gambar sandera yang diambil sebelum dan sesudah penyanderaan selama delapan bulan menunjukkan jika mereka lebih baik dari sebelumnya. ● mar

Jokowi Kurban 68 Ekor Sapi...

Berdasarkan data yang dihimpun sapi yang akan diserahkan Presiden Jokowi sebanyak 68 ekor dengan berbagai jenis yakni simmental, peranakan on-gole, brangus, bali, hingga limosin.

Sapi yang diserahkan 68

ekor itu, dengan rincian 38 ekor untuk setiap masing-masing pemerintah provinsi seluruh Indonesia. Untuk Masjid Istiqlal satu ekor, Otorita IKN satu ekor.

Lalu, Masjid tempat Presiden Jokowi akan sholat Idul Adha akan diberikan

satu ekor. Dan 27 ekor untuk Tokoh Adat, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Pemprov Kaltim serta Masjid dan Ponpes yang berdekatan dengan IKN.

Heru menjelaskan bahwa pihaknya telah bekerjasama dengan Ke-

menterian Agama dan dinas peternakan untuk memastikan kondisi sapi-sapi dalam keadaan baik sebelum diserahkan kepada pemerintah provinsi atau masjid-masjid.

“Dan juga dinas dari dirjen kementerian agama.

Kami pastikan semua sapi dalam sebuah proses di dalam rangka pemilihan tersebut melalui rangkaian-rangkaian kesehatan sehingga terhindar dari penyakit yang memang tidak kita inginkan,” jelasnya. ● osm